Radar Bali

KASUS PAVING GAJAH MADA

Dua Tersangka Huni Mapenaling

KASUS korupsi paving Jalan Gajah Mada ditahan oleh Jaksa Kejari Denpasar, setelah dilimpahkan oleh Tim Penyidik Polresta Denpasar. Sejak Kamis (13/8) dua tersangka ini menjalani penahanan, dan menurut Kalapas Kerobokan dua orang ini masih mendekam di mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). Kalapas Sujonggo membenarkan ada dua tahanan dari Kejari Denpasar di Lapas Kerobokan. Dia mengatakan dua orang ini ditempatkan di Blok J yaitu blok mapenaling. "Biasalah baru masuk ke Mapenaling dulu, kami taruh di Blok J," jelas Sujonggo saat dikonfirmasi kemarin.

Dia mengatakan kondisi dua tahanan kasus paving ini dalam kondisi sehat. Nanti setelah satu minggu baru akan masuk ke blok lainnya. siapa saja yang di blok J? dia mengatakan semua napi baru, Sujonggo mengatakan mapenaling di Lapas Kerobokan tidak ada khusus tipikor tapi umum. "Jadi yang dapat mapenaling ya di blok J. kalau kasus - kasus tipikor, yang baru masuk semua ke Blok J dulu. Sebelumnya ada Bupati Lobar (Zaini) ada Pak Titib dan lainnya," ungkapnya.

Dua tersangka yang dimaksud adalah, dua - duanya menjabat Direktur. Dua nama itu adalah, Alit Widhiadnyana, 32 yang adalah putra kelahiran Tabanan 11 September 1982. Dia adalah Direktur PT Alit Wirajaya yang menggarap proyek pedisterian Jalan Gajah Mada. Dengan alamat Jalan Cokroaminoto Gang Angsa nomor 8 Denpasar.

Sedangkan tersangka ke dua adalah, Ngurah Kosala Cakrawethi, 32 kelahiran Jembrana 17 November 1981. Yang adalah Direktur CV Unika Desain, sebagai Konsultan Pengawas proyek pedisterian Jalan Gajah Mada. **(art/han)**

Edisi : Minggu, 16 Agustus 2015

Hal : 24

Radar Bali

Serapan Anggaran Meleset

Dari Hasil Evaluasi Kinerja Semester I

SINGARAJA – Pemerintah daerah telah menjalankan program kerjanya selama enam bulan terakhir. Meski telah berjalan selama enam bulan, rupanya tak semua program kerja yang direncanakan bisa direalisasikan dalam semester pertama. Peralihan aturan disebut menjadi ganjalan realisasi program kerja pemerintah.

Dari hasil evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng mencatat, masih ada 30 persen SKPD yang realisasi kinerja dan anggarannya di bawah 50 persen. Seharusnya sampai dengan 30 Juni 2015, realisasi anggaran dan realisasi program kerja telah mencapai 50 persen, sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2014 lalu.

Kepala Bappeda Buleleng Gede Dharmaja mengatakan, banyak serapan anggaran dan realisasi program, terpengaruh dengan perubahan aturan. Salah satunya realisasi anggaran alokasi dana desa (ADD), yang sebagian baru bisa dilakukan pada bulan Juli tahun ini.

"Itu salah satu contoh perali-

han produk hukum, dan ini sangat berpengaruh pada kinerja BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Red). Karena peralihan aturan dan harus diikuti, makanya serapan anggaran dan realisasi program ikut terpengaruh," jelas Dharmaja.

Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra mengatakan, rata-rata SKPD sudah menunjukkan kinerja di atas target capaian. "Memang ada beberapa yang meleset. Tapi itu karena kebijakan pusat, perubahan aturan, dan itu tidak bisa diprediksi," kata Sutjidra.

Ia meminta agar seluruh SKPD lebih intensif berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan. Sehingga program kerja yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun. **(eps/yor)**

Edisi : Minggu, 16 Agustus 2015

Hal : 25